

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Abdul. (2024). *Teori Hukum Pancasila* (1 ed). Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana.
- Annita. (2023). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (1 ed). Jayapura: CV. Angkasa Pelangi.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. (2015). *Hukum Pidana* (1 ed). Malang: Setara Press
- Asmara,I. (2019). *Lembaga Bantuan Hukum dan Perannya dalam Masyarakat* (1 ed). Jakrata: Pustaka Ilmu.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi Keadilan Sosial* (1 ed). Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif* (1 ed). Depok : Prenadamedia Group.
- Erwin, Muh. (2011). *Refleksi Kritis Terhadap Hukum* (1 ed). Jakarta: Rajawali Press.
- Farkhani. (2019). *Filsafat Hukum* (1 ed). Solo: Kafilah Publisher.
- Fathor. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (2 ed). Yogyakarta: IAIN Kediri Press.
- Handayani, F. (2016). *Bantuan Hukum Indonesia* (3 ed). Yogyakarta: Kalimedia.
- Hasan. (2020). *Penelitian Kualitatif* (1 ed). Medan: Wal ashri Publishing.
- Josua, Siska, & Nanda. (2021). *Kebijakan Bantuan Hukum Di Indonesia Dalam Kerangka Demokrasi* (1 ed). MaPPI FH UI.
- Kennedi, Jhon. (2014). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (1 ed). Jakarta: Pustaka Pelajar
- Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (1 ed). Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Masna, Yunita. (2017). *Bantuan Hukum* (1 ed). Padang: Imam Bonjol Press.
- Mukianto, J. (2020). *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*. (1 ed). Banten: Merdeka Press.

- Prasetyorini, S. A. (2024). *Reformulasi Pengaturan Pendirian Lembaga Bantuan Hukum dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum* (1 ed). Jawa Tengah: CV Lawwana.
- Rahman, A. (2021). *Hak Atas Keadilan : Peran Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia* (1 ed). Bansung: Ganesha Press.
- Soekanto, Soerjono. (2011). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (1 ed). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Solikin. (2019). *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum* (1 ed). Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.
- Sri, Wahyuni. (2022). *Bantuan Hukum Secara Gratis di Indonesia* (1 ed). Depok: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, R&D* (5 ed). Jakarta: Jaya Publishing.
- Suteki. (2021). *Hukum dan Masyarakat* (1 ed). Yogyakarta: Tahfa Media.
- Syafrida. (2021). *Metodologi Penelitian* (1 ed). Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Tamaulina. (2023). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)* (1 ed). Karawang: Saba Jaya Publisher.
- Usman, Sabian. *Menuju Penegakan Hukum Responsif* (2 ed). Yogyakarta. Pustaka Media.
- Wardiono, Kelik. (2016). *Paradigma Profetik: Pembaruan Basis Epistemologi Ilmu Hukum* (1 ed). Yogyakarta: Genta Publishing.

Artikel dalam Jurnal

- Abdi, A., Nasution, M., & Fauziah. (2023). Peranan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, III(3), 706.
- Ahyar. (2020). Optimalisasi Pelayanan Bantuan HUKUM Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, III(5), 345.
- Andi. (2023). Efektivitas Bantuan Hukum Untuk Menjamin Akses terhadap Hukum dan Keadilan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, VII(3), 2119.
- Andika. (2024). Efektivitas Pemberian Pro Bono Di Pos Bantuan Hukum. *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati*, IV(2), 1763.

- Ariawan, Sihotang, & Suryana. (2023). Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. *AL DALIL : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, I(3), 41.
- Arie. (2022). Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kota Medan. *Jurnal Locus*, I(5), 285.
- Dedy. (2024). Lembaga Bantuan Hukum dalam Hak Asasi Manusia. *Jurnal Indragiri*, IV(2), 60.
- Enny, A. (2021). Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Solusi*, XIX(2), 214.
- Fauzan. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. *Jurnal Multidisiplin Borobudur*, I(2), 104.
- Gayo, A. A. (2020). Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Penelitian Hukum*, XX, 410.
- Genta, Brahmanta, Rai Yulianti, N. P., & Sudika Mangku, D. G. (2021). Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Terhadap Pengadaan Pos Bantuan Hukum Pada Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, IV (4), 86.
- Gurusi. (2020). Analisis Hukum Pelaksanaan Peran Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. *Jurnal Hukum Volkgeist*, I(2), 1357.
- Handri. (2024). Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Rakyat Miskin di Kota Padang. *Jurnal Ardenjaya*, IV(3), 1874.
- Herawati. (2024). Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, III(3), 970.
- Herdi, & Christo. (2021). Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, VIII(2), 185.
- Ibnu, & Selvia. (2022). Tinjauan Asas Equality Before The Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Tata Negara*, II(2), 41.

- Imam, S., & Puspita, I. (2018). Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin. *Jurnal Konstitusi*, XV, 55.
- Jose, A. (2025). Tantangan Dan Strategi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Rio Law Jurnal*, I (2), 49.
- Julianti. (2023). Pancasila Sebagai Dasar Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Advances In Social Humanities Research*, I(4), 465.
- Kinanty, Putri, A., & Lubis. (2023). Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Orang yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, V(2), 454.
- La Ode, Adnan; Dewi, Rasmala. (2024) Penyuluhan Hukum Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Journal of Human And Education*, IV(1), 1209.
- Laurensius. (2022). Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Untuk Mewujudkan Keadilan. *Jurnal Cendekia Hukum*, VII(2), 330.
- Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138-155.
- Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Penggunaan Media Sosial Secara Bijak Sebagai Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 1(1), 57-62.
- Marzuki, Djalil, H., & Mujibussalim. (2020). Kedudukan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Menjalankan Hukum Nasional. *Syiah Kuala Law Journal*, I(3), 57.
- Oldy Rosy, K., Sudika Mangku, D. G., & Rai Yulianti, N. P. (2021). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166.

- Osgar. (2021). Pendampingan Hukum Pemberian Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin di Paringi Moutoung. *Borobudur Jurnal*, II(1).
- Prawira. (2021). Reviu Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Rangka Pemenuhan Akses Terhadap Keadilan. *Dharmasiswa*, XI, 884.
- Putu Monika Dewi, I. A., Rai Yulianti, N. P., & Sudika Mangku, D. G. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.
- Raharjo, A. (2020). Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat). *Jurnal Mimbar Hukum*, XXVII, 433.
- Rini. (2020). Permasalahan Akses Keadilan Melalui Pemberi Bantuan Hukum Di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, III(1), 58.
- Sahabat, A., Arti, & Insani, N. (2023). Efektivitas Bantuan Hukum Untuk Menjamin Akses Terhadap Hukum dan Keadilan. *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial dan Pengetahuan)*, VII(3), 2118.
- Setyo. (2021). Rekonstruksi Asas Equality Before The Law dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Fundamental*, X(2), 133.
- Siti. (2025). Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Konsultasi Dan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia. *Jurnal Media Akademik*, II(3), 892.
- Timon. (2021). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmu Pemerintah Suara Khatulistiwa*, VI(2), 160.
- Widzar. (2021). Optimalisasi Layanan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, I(4), 1209.
- Yulianti, N. P. R., Mangku, D. G. S., & Ardhy, S. N. (2021). Advokasi Dan Sosialisasi Terkait Pendidikan Seks Dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Singaraja. *Proceeding Senadimas Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Yulianti, N. P. R., Mangku, D. G. S., & Ardhy, S. N. (2022). Diseminasi Dan Advokasi Terkait Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Kenakalan Anak-anak Di Lembaga Kesejahteraan Sosial

Anak Ananda Seva Dharma. *Proceeding Senadimas Universitas Pendidikan Ganehsa*.

Yustinus. (2020). Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan. *Jurnal Humaniora*, III(2), 237.

Yusuf. (2025). Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Bantuan Hukum Dalam Membantu Masyarakat. *Jurnal Intelek dan Cendikiawan*, II(2), 1173.

Artikel dalam Internet

Armi, W. (2025). *Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tidak Mampu*. Radio Republik Indonesia. Retrieved from <https://www.rri.co.id/editorial/2692/bantuan-hukum-untuk-masyarakat-tidak-mampu> (Diakses pada 18 Juni 2025)

Pusdatin. (2023). *Sekilas Kantor Wilayah*. Kemenkum.go.id. <https://bali.kemenkum.go.id/profil/sekilas-kantor-wilayah> (Diakses pada 2 September 2025)

Pusdatin. (2023). *Visi dan Misi*. Kemenkum.go.id. <https://bali.kemenkum.go.id/profil/visi-misi> (Diakses pada 2 September 2025)

Pusdatin. (2023). *Tugas Pokok dan Fungsi*. Kemenkum.go.id. <https://bali.kemenkum.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi> (Diakses pada 2 September 2025)

Rhismawati. (2024). *Pemkot Denpasar berikan bantuan hukum gratis ke kelompok rentan*. Bali: Antara Bali. Retrieved from <https://bali.antaranews.com/berita/350771/pemkot-denpasar-berikan-bantuan-hukum-gratis-ke-kelompok-rentan> (Diakses pada 25 Juni 2025)

Fitri. (2024). *Banyak Beri Manfaat, Advokat Muda Perlu Terlibat dalam Pro Bono*. Hukum Online. Retrieved <https://www.hukumonline.com/berita/a/banyak-beri-manfaat--advokat-muda-perlu-terlibat-dalam-pro-bono-lt67585c366a98d/> (Diakses pada 25 Juni 2025)

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Haruna, L. (2024). Efektifitas Peranan Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Parepare. *(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare)*.
- Bayu, T. (2021). Efektivitas Bantuan Hukum dengan Cuma-Cuma dalam Perkara Tindak Pidana (Prodeo), (Studi Pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan). *(Skripsi, Universitas Muslim Indonesia)*.
- Fitri, E. (2020). Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu yang Dilakukan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge. *(Skripsi, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN))*.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Lembaga atau Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Periode 2022–2024